

Jalan Panjang Kerja Advokasi

Isu Perempuan dan Kebijakan Publik di Kota Tangerang



Dokumentasi Kerja Advokasi The Indonesian Institute
Program Kampanye Publik
Mendukung Kesetaraan Hak Konstitusional Perempuan
dalam Proses Kebijakan Publik di Kota Tangerang
Mei 2009 – Februari 2010

Jalan Panjang Kerja Advokasi

Isu Perempuan dan Kebijakan Publik di Kota Tangerang

Dokumentasi Kerja Advokasi The Indonesian Institute

Program Kampanye Publik

**Mendukung Kesetaraan Hak Konstitusional Perempuan
dalam Proses Kebijakan Publik di Kota Tangerang**

Mei 2009 – Februari 2010

Jalan Panjang Kerja Advokasi Isu Perempuan dan Kebijakan Publik di Kota Tangerang

Dokumentasi Kerja Advokasi The Indonesian Institute
Program Kampanye Publik Mendukung Kesetaraan
Hak Konstitusional Perempuan Dalam Proses
Kebijakan Publik Di Kota Tangerang
Mei 2009 – Februari 2010

Disusun dan Diterbitkan Oleh:

 **THE** **INDONESIAN INSTITUTE**
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia
Tel. 021 **390 5558** Fax. 021 **3190 7814**
www.theindonesianinstitute.com

Tim Penyusun

Adinda Tenriangke Muchtar (*Team Leader*)
Antonius Wiwan Koban (*Project Officer*)
Benni Inayatullah (*Project Officer*)

Jakarta, Februari 2010

ISBN 978-979-17798-2-1

36 halaman
18 x 27 cm

Design & Layout:
harhar muharam, **benang komunikasi**
benang_komunikasi@yahoo.com
T. 021**533 2681** F. 021 **549 1400**

Dicetak Oleh: Gloria Printing, Jakarta

Kata Pengantar

Buku ini berisi tentang dokumentasi kerja advokasi **The Indonesian Institute**, Center for Public Policy Research (TII) dalam melakukan program kampanye publik dengan tema besar “Mendukung Kesetaraan Hak Konstitusional Perempuan dalam Proses Kebijakan Publik di Kota Tangerang”. TII melaksanakan program ini sejak bulan Mei 2009 sampai Juni 2010 bersama dengan dua mitra lainnya, yaitu SETARA Institute dan PBHI Jakarta.

Program kampanye publik TII di Kota Tangerang terkait tema ini dilakukan dalam empat rangkaian kegiatan, yaitu dua kali diskusi publik dan dua kali dengar pendapat umum, serta publikasi berupa buku tentang dokumentasi kegiatan kampanye publik TII di Kota Tangerang.

Rangkaian kampanye publik untuk mendukung terwujudnya pluralisme sosial dan kesetaraan hak perempuan di Kota Tangerang ini dilakukan melalui penyebaran informasi dan diskusi tentang partisipasi masyarakat dan proses pembuatan kebijakan yang didorong ke arah penghargaan terhadap pluralisme sosial dan kesetaraan hak perempuan.

Kampanye publik ini ditujukan pada target-target sesuai prinsip tiga pilar masyarakat madani, yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Seperti diketahui, masing-masing pihak tersebut berkontribusi secara hak dan kewajiban dalam perwujudan masyarakat madani, termasuk apabila ingin diwujudkan pluralisme sosial dan kesetaraan hak perempuan.

Untuk itulah, dalam setiap kegiatan kampanye tersebut, TII melibatkan narasumber dari Pemerintah Kota (BPMKB, Bappeda, dan Sekda), serta DPRD Kota Tangerang, selain dari kalangan akademisi, LSM dan mitra kerja advokasi (PBHI Jakarta dan SETARA Institute). Para peserta pun beragam dari masyarakat umum, individu, pengajar, guru, buruh, aktivis perempuan, media, mahasiswa, dan sebagainya yang peduli akan isu ini.

Kegiatan kampanye publik TII di Kota Tangerang sendiri memiliki tujuan umum maupun khusus. Tujuan Umum dari kampanye publik TII tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan (aspek kognisi) kepada masyarakat (terutama tentang partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan) dan pejabat publik, serta *stakeholders*; kesadaran dan keberpihakan yang positif (aspek afeksi) pada pluralisme sosial dan kesetaraan hak perempuan; dan perilaku serta tindakan (aspek konasi) yang mendukung pluralisme sosial dan kesetaraan hak perempuan.

Sementara tujuan khusus dari pelaksanaan kampanye publik TII di Kota Tangerang sendiri dikaitkan dengan bentuk kegiatan kampanye. **Diskusi publik** ditujukan untuk sosialisasi wacana-wacana yang ideal maupun yang pragmatis, terkait partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan yang menjunjung tinggi pluralisme sosial dan kesetaraan hak-hak perempuan. Diskusi publik juga ditujukan untuk membahas masalah-masalah dalam perwujudan pluralisme sosial dan kesetaraan hak-hak perempuan.

Public hearing ditujukan untuk memberikan suatu forum dengar pendapat masyarakat dan pemangku kepentingan guna terciptanya kebijakan publik yang memberikan ruang bagi partisipasi publik yang lebih luas, serta mendukung pluralisme sosial dan kesetaraan hak-hak perempuan.

Sementara, **Publikasi** ditujukan untuk menyebarluaskan materi-materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta rekomendasi terkait partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan pluralisme sosial dan kesetaraan hak-hak perempuan.

Doc. The Indonesian Institute



TII berharap bahwa program ini dapat mendorong perwujudan ataupun perubahan wawasan, kesadaran, dan sikap dari *stakeholder* terkait. Selain itu, berdasarkan program tersebut, TII juga menghasilkan publikasi dan penyebaran informasi yang relevan dan kontekstual, serta komprehensif tentang partisipasi masyarakat dan akuntabilitas serta kredibilitas proses kebijakan publik.

Hal ini pula yang menjadi tujuan TII mempublikasikan buku ini. Dari kegiatan ini, TII juga ingin memberikan rekomendasi yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan, terkait dengan upaya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dan masukan bagi pejabat publik dalam pelibatan partisipasi masyarakat.

Untuk itu pula, buku ini TII tujuikan untuk target pembaca yang relevan, baik pembuat kebijakan secara khusus dan para pemangku kepentingan di Kota Tangerang secara khusus, dan target pembaca umum yang tertarik dan peduli akan topik ini. Kami harap kampanye publik TII di Kota Tangerang dapat dimanfaatkan baik dalam proses kebijakan maupun untuk kepentingan advokasi kebijakan publik, maupun referensi akademik maupun media massa.

Dengan demikian, diharapkan agar upaya untuk mendorong kebijakan publik yang mendukung pluralisme sosial dan kesetaraan perempuan di Kota Tangerang khususnya, maupun di Indonesia umumnya dapat dilanjutkan oleh berbagai pihak, baik dari pembuat kebijakan maupun masyarakat sipil.

Akhir kata, TII juga ingin mengucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak yang terlibat terutama mitra kerja advokasi dalam kegiatan ini. Juga kepada para narasumber dan peserta yang ikut peduli dan berpartisipasi dalam proses kampanye publik TII di Kota Tangerang selama ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Februari 2010

The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research*

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Selayang Pandang Kerja Advokasi TII di Kota Tangerang	5
Latar belakang	5
Gambaran program	6
Pihak-pihak yang bermitra	8
Partisipan Kegiatan	9
Diskusi Publik 1	9
<i>Public Hearing</i> 1	10
Diskusi Publik 2	11
<i>Public Hearing</i> 2	12
Dinamika Advokasi Kesenjangan Gender dan Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan di Kota Tangerang	
Hasil-hasil pembahasan Diskusi Publik & <i>Public Hearing</i>	13
Dukungan dan Tantangan	
Dukungan Internal & Eksternal	18
Tantangan Internal & Eksternal	20
Monitoring dan Evaluasi	
Tanggapan Pembuat Kebijakan dan Pemangku Kepentingan	23
Pelajaran yang dipetik (<i>Lessons Learned</i>)	28
Peluang ke Depan	
Kesimpulan	30
Rekomendasi	31
Profil Institusi	
The Indonesian Institute	32

Selayang Pandang Kerja Advokasi TII di Kota Tangerang

Latar belakang

The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research* dalam visi misinya berkomitmen untuk menyumbang kepada debat-debat kebijakan publik dan untuk perbaikan kualitas dari pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di negeri ini. **The Indonesian Institute** meyakini bahwa kebijakan publik yang kredibel dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dihasilkan melalui sinergi positif dan interaksi di antara semua pemegang-pemegang kepentingan. Oleh karena itu, di dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya, **The Indonesian Institute** berusaha untuk mendorong dialog dan pertemuan di antara tiga segmen besar: pejabat-pejabat publik, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil.

The Indonesian Institute bekerja dalam area kebijakan publik di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Salah satu permasalahan yang aktual dalam bidang sosial adalah kepedulian akan kebijakan publik yang memperhatikan pluralisme sosial dan mendukung kesetaraan hak perempuan. Berangkat dari keprihatinan terhadap dampak dari euforia otonomi daerah, **The Indonesian Institute** melihat bahwa produk kebijakan publik di tataran Pemerintah Daerah menjadi signifikan, termasuk pula yang terkait langsung dengan pengarusutamaan gender dan kesetaraan hak perempuan serta perlindungan hak-hak konstitusional kaum perempuan.

Doc. The Indonesian Institute



Analisis situasi perwujudan kebijakan publik terkait pluralisme sosial dan kesetaraan hak-hak perempuan di Kota Tangerang, Propinsi Banten, menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Adanya kecenderungan politisasi identitas agama dan perempuan dan menjadikan agama dan moral sebagai dasar pembuatan kebijakan dan aturan
- (2) Belum adanya perhatian signifikan dari organisasi buruh yang beranggotakan perempuan terhadap Peraturan Daerah yang mendiskriminasi perempuan

- (3) Minimnya partisipasi publik terutama perempuan dalam pembuatan kebijakan dan aturan
- (4) Kurangnya kapabilitas *legal drafter* ditambah dengan kurang berfungsinya mekanisme prevensi dari Departemen Dalam Negeri dan evaluasi dari Mahkamah Agung terhadap produk-produk Peraturan Daerah.

Untuk memperbaiki hal-hal tersebut, antara lain diperlukan adanya kampanye publik untuk mendorong terjadinya perwujudan maupun perubahan situasi-situasi tersebut di atas.

Dalam rangka itulah, **The Indonesian Institute** menyusun suatu rangkaian kampanye publik untuk mendukung terwujudnya pluralisme sosial dan kesetaraan hak perempuan di Kota Tangerang lewat penyebaran informasi dan diskusi tentang partisipasi masyarakat dan proses pembuatan kebijakan yang didorong ke arah penghargaan terhadap pluralisme sosial dan kesetaraan hak perempuan.

Gambaran program

Kampanye Publik **The Indonesian Institute** ini dilakukan dalam serangkaian kegiatan yaitu:

- **Diskusi Publik 1 dan 2**
- **Public Hearing 1 dan 2**
- **Publikasi**

Periode pelaksanaan program adalah Mei 2009 sampai dengan Juni 2010. Ruang lingkup program adalah di Kota Tangerang, Propinsi Banten.

Tujuan khusus setiap kegiatan

KEGIATAN	TUJUAN KHUSUS	TUJUAN UMUM
Diskusi Publik	sosialisasi wacana-wacana yang ideal maupun yang pragmatis terkait partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan.	dalam upaya mewujudkan pluralisme sosial dan kesetaraan hak-hak perempuan
Public Hearing	memberikan suatu forum dengar pendapat masyarakat dan pemangku kepentingan guna terciptanya kebijakan publik yang memberikan ruang bagi partisipasi publik yang lebih luas	
Publikasi	menyebarkan materi-materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta rekomendasi terkait partisipasi masyarakat	

Pelaksanaan kegiatan

NAMA KEGIATAN, TEMPAT, WAKTU	TARGET AUDIENS	AUDIENS HADIR
Diskusi Publik 1 Tangerang, 24 Juni 2009	40 orang	34 orang
Diskusi Publik 2 Tangerang, 28 Oktober 2009	40 orang	46 orang
Public Hearing 1 Tangerang, 12 Agustus 2009	40 orang	51 orang
Public Hearing 2 Tangerang, 9 Desember 2009	40 orang	34 orang
Publikasi Januari - Februari 2010	250 eksemplar	

Tema Diskusi Publik dan *Public Hearing*

KEGIATAN	NO.	TEMA
Diskusi Publik	1	Meningkatkan Sensitivitas Jender Aparatur Pemerintah dan DPRD, serta Masyarakat Kota Tangerang dalam Proses Kebijakan Publik
Public Hearing	1	Perlindungan terhadap Hak dan Kepentingan Perempuan dalam Kebijakan Publik untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Kota Tangerang
Diskusi Publik	2	Membangun Jejaring antara Pemerintah, DPRD, dan Partisipasi Publik Masyarakat Kota Tangerang dalam Proses Kebijakan Publik yang Memperhatikan Pluralisme Sosial dan Kesetaraan Perempuan
Public Hearing	2	Penguatan Mekanisme Partisipasi Publik dalam Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Publik yang Mendukung Pluralisme Sosial dan Perlindungan Hak Perempuan di Kota Tangerang

Pihak-pihak yang bermitra

The Indonesian Institute tidak sendirian dalam menyelenggarakan kampanye advokasi mendukung pluralisme sosial dan kesetaraan hak perempuan di Kota Tangerang, Banten. Terkait dan saling mendukung dengan program The Indonesian Institute ini, di Kota Tangerang pada saat yang bersamaan juga secara bersinergi, ada mitra-mitra lainnya yang terlibat dalam kerja advokasi di Kota Tangerang dengan mengusung tema yang sama. Mitra-mitra itu adalah:



PBHI Jakarta

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Jakarta adalah organisasi berbentuk perhimpunan dengan

keanggotaan yang bersifat perorangan dan sukarela serta berasaskan pada nilai-nilai universal hak asasi manusia (*human rights*). Kedudukannya otonom dikaitkan dengan keberadaan PBHI Nasional. Lembaga ini didedikasikan untuk promosi dan pembelaan hak asasi manusia dan didasarkan pada visi yang berdasarkan hubungan antara individu/kelompok orang dengan negara yang menjalankan kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak manusia.

PBHI Jakarta menggarap kerja advokasi dengan fokus pada Pengorganisasian Komunitas (Basis) untuk mendorong dan meningkatkan peran partisipasi perempuan dalam pemenuhan hak-hak konstitusional khususnya dalam pembuatan kebijakan dan aturan publik di Kota Tangerang. Kegiatan yang dilakukan (1) pemetaan persoalan hak perempuan di kota Tangerang, (2) *Workshop* pemaparan hasil pemetaan persoalan perempuan dan penyusunan modul hak-hak perempuan, (3) Diskusi Forum Warga, dan (4) Publikasi *Newsletter*. PBHI Jakarta juga mendukung kerja advokasi The Indonesian Institute dengan menjadi narasumber dalam kegiatan *Public Hearing* 1 dan 2.



SETARA

Institute for Democracy and Peace

SETARA Institute adalah lembaga yang didedikasikan pada nilai-nilai kesetaraan, kemanusiaan, pluralisme dan demokrasi. SETARA Institute meyakini bahwa masyarakat

demokratis akan tercapai apabila tumbuh saling pengertian, penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Lembaga ini mengambil bagian untuk mendorong terciptanya kondisi politik yang terbuka dan partisipasi yang lebih luas untuk memajukan demokrasi melalui pengakuan dan pembelaan hak-hak manusia, termasuk kepentingan perempuan dalam kebijakan publik.

SETARA Institute menggarap kerja advokasi di Kota Tangerang dengan fokus pada *lobby* untuk mendorong komitmen dari institusi legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemkot) dalam pelibatan dan partisipasi perempuan dalam penyusunan kebijakan daerah dan aturan publik. Program tersebut dijabarkan dalam rangkaian kegiatan yaitu (1) penyusunan kertas kebijakan “Penguatan Partisipasi Perempuan & Pelembagaan Mekanisme Prevensi dan Evaluasi Kebijakan Daerah”, (2) sosialisasi kertas kebijakan kepada masyarakat sipil di Kota Tangerang, dan (3) dialog kebijakan dengan institusi pemerintahan daerah dalam rangka penyampaian kertas kebijakan. SETARA Institute juga mendukung kerja advokasi The Indonesian Institute dengan menjadi narasumber dalam kegiatan Diskusi Publik 1 dan 2.

Partisipan Kegiatan

Diskusi Publik 1

Tema : Meningkatkan Sensitivitas Jender Aparatur Pemerintah dan DPRD serta Masyarakat Kota Tangerang dalam Proses Kebijakan Publik

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari, tanggal :

Rabu, 24 Juni 2009

Waktu :

Pukul 14.00-17.00 WIB

Tempat :

Aryaduta Karawaci, Tangerang

NARASUMBER

- **Dra. Lilis Nawangsih**,
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Pemerintah Kota Tangerang
- **H.M. Cholil Abdul Madjid**,
Pimpinan Komisi A, DPRD Kota Tangerang (2004-2009)
- **Neng Dara Affiah**,
Ketua Sub Komisi Pendidikan & Litbang Komnas Perempuan
- **M. Syauqillah**,
SETARA Institute

PARTISIPAN YANG HADIR

- **Kelompok perempuan**
(Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Tangerang)
- **Media lokal dan nasional**
(antara lain Tangerang Tribune, The Jakarta Post, Indo Pos, Ad Info, Info Serpong)
- **NGO Mitra**
(Setara Institute, PBHI Jakarta)
- **Pemerintah**
(antara lain Staff BPMKB, staff Dephukham)
- Ibu rumah tangga, masyarakat umum

Doc. The Indonesian Institute



Narasumber Diskusi Publik 1 : (Kiri ke Kanan)
Neng Dara Affiah, Dra. Lilis Nawangsih,
H.M. Cholil Abdul Madjid

Doc. The Indonesian Institute



Partisipan Diskusi Publik 1

Public Hearing 1

Tema : Perlindungan terhadap Hak dan Kepentingan Perempuan dalam Kebijakan Publik untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Kota Tangerang

Doc. The Indonesian Institute



Narasumber Public Hearing 1
(Kiri ke Kanan) Sandra Sahelangi (Moderator),
Dra. Eny Nuraeny, Supriyadi Sebayang.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari, tanggal :

Rabu, 12 Agustus 2009

Waktu :

Pukul 14.00-17.00 WIB

Tempat :

Santika, BSD City, Tangerang

NARASUMBER

- **Dra. Eny Nuraeny**,
Kepala Sub Bidang
Pengarusutamaan Gender, BPMKB
Pemerintah Kota Tangerang
- **Supriyadi Sebayang**,
Advokat PBHI Jakarta

Doc. The Indonesian Institute



Peserta Public Hearing 1

PARTISIPAN YANG HADIR

- **Kelompok perempuan**
(KPI Tangerang)
- **Media lokal dan nasional**
(antara lain Tangerang Ekspres,
Indo Pos, Tangerang Selatan
Post, Info Serpong, Ad Info, Radar
Tangerang, Klikp21.com, Seruu.
com, Jurnal Nasional,
Tangerang Online)
- **NGO Mitra**
(Setara Institute, PBHI Jakarta)
- **Pemerintah**
(antara lain Staff BPMKB)
- Serikat pekerja, mahasiswa,
praktisi, akademisi kampus,
lembaga kajian, karang taruna,
guru SMA, perorangan

Diskusi Publik 2

Tema: Membangun Jejaring antara Pemerintah, DPRD, dan Partisipasi Publik Masyarakat Kota Tangerang dalam Proses Kebijakan Publik yang Memperhatikan Pluralisme Sosial dan Kesenjangan Perempuan

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari, tanggal :

Rabu, 28 Oktober 2009

Waktu :

Pukul 14.00-17.00 WIB

Tempat :

Aryaduta Karawaci, Tangerang

NARASUMBER

- **Ir. Suratno Abubakar**,
Anggota DPRD Kota Tangerang
(2009-2014)
- **H.A. Rachmat Hadis**,
Kepala Bappeda Kota Tangerang
- **Yayan Sopiyan**,
Kepala Bagian Organisasi, Sekda
Kota Tangerang
- **Sukron Kamil**,
Koordinator Program Demokrasi
& Dialog Budaya, CSRC UIN Syarif
Hidayatullah
- **M. Syauqillah**,
SETARA Institute

PARTISIPAN YANG HADIR

- **Kelompok perempuan**
(KPI Tangerang)
- **Balegda Indonesia**
- **NGO Mitra**
(Setara Institute, PBHI Jakarta)
- **Pemerintah**
(antara lain Staff Bappeda,
DPRD, Sekda)
- Lembaga kajian kampus, ormas,
serikat buruh, asosiasi profesi,
organisasi mahasiswa

Doc. The Indonesian Institute



Narasumber Diskusi Publik 2 : (Kiri ke Kanan)

Ir. Suratno Abubakar, Sukron Kamil,
Aly Yusuf (Moderator), M. Syauqillah,
Yayan Sopiyan, H.A. Rachmat Hadis

Doc. The Indonesian Institute



Sesi tanya jawab Diskusi Publik 2

Public Hearing 2

**Tema: Penguatan Mekanisme Partisipasi Publik
dalam Proses Kebijakan yang Mendukung Pluralisme Sosial
dan Perlindungan Hak Perempuan di Kota Tangerang**

Doc. The Indonesian Institute



Narasumber Public Hearing 2
(Kiri ke Kanan) Agah Yogaswara, Alif Imam
Nurlambang, Aly Yusuf (moderator)

Doc. The Indonesian Institute



Partisipan Public Hearing 2

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari, tanggal :

Rabu, 9 Desember 2009

Waktu :

Pukul 14.00-17.00 WIB

Tempat :

Santika, BSD City, Tangerang

NARASUMBER

- **Agah Yogaswara**,
Kepala Bidang Sosial Ekonomi,
Bappeda Kota Tangerang
- **Alif Imam Nurlambang**,
PBHI Jakarta

PARTISIPAN YANG HADIR

- **Kelompok perempuan**
(KPI Kota Tangerang)
- **Media lokal dan nasional**
(antara lain Suara Pembaruan,
Tangerang Ekspres, Indo Pos,
Metro TV, TV One, CTV Banten)
- **NGO Mitra**
(Setara Institute, PBHI Jakarta)
- Ibu rumah tangga, serikat pekerja,
ormas, akademisi, lembaga
kajian, masyarakat umum

Dinamika Advokasi Kesetaraan Gender dan Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan di Kota Tangerang

Kampanye advokasi mendukung pluralisme sosial dan kesetaraan hak perempuan di Kota Tangerang, Banten yang diselenggarakan oleh TII melalui diskusi publik maupun *public hearing* menjadi wadah bagi pihak pengambil kebijakan dan aktivis perempuan untuk saling berbagi dan bertukar pikiran mengenai kesetaraan hak perempuan di Kota Tangerang. Dalam empat kali pertemuan itu telah terbentuk pembicaraan atau diskusi yang membangun dan dinamis, sehingga bermanfaat bagi pembuat kebijakan maupun bagi masyarakat Kota Tangerang umumnya dan pekerja perempuan khususnya.



Bagi pengambil kebijakan di Kota Tangerang, diskusi publik dan *public hearing* yang dilangsungkan setidaknya mempunyai dua manfaat. **Pertama**, menjadi sarana untuk melakukan sosialisasi kebijakan yang selama ini banyak mendapatkan pro dan kontra, terutama dari aktivis perempuan maupun elemen masyarakat lainnya. **Kedua**, menerima masukan dan kritikan dari pekerja perempuan maupun aktivisnya mengenai kelemahan dan kekurangan dari kebijakan Pemkot Tangerang, khususnya mengenai Perda-perda yang dinilai bernuansa Syariah dan dirasa mendiskriminasi perempuan, terutama pekerja perempuan kota Tangerang.

Bagi pekerja perempuan dan atau aktivis perempuan yang selama ini memperjuangkan hak pekerja perempuan di Kota Tangerang, kegiatan ini juga bermanfaat untuk langsung bertatap muka dengan pengambil kebijakan di Kota Tangerang, baik dari Pemkot maupun DPRD sehingga aspirasi kaum perempuan yang termarginalkan bisa disalurkan melalui wadah yang tepat. Selain itu, aktivis perempuan juga berhasil memanfaatkan momen tersebut untuk membangun jejaring strategis, terutama dengan pembuat kebijakan yang hadir, seperti Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Pemkot Tangerang, Bappeda, Sekda, dan DPRD Kota Tangerang; serta dengan kelompok LSM, kalangan akademisi dan mahasiswa, serikat buruh, serta pihak lain yang relevan; dan media massa untuk terus memperjuangkan isu ini.

Dinamika advokasi kesetaraan gender dan partisipasi publik dalam proses kebijakan Kota Tangerang bisa digambarkan melalui empat kegiatan berikut ini.

Diskusi Publik 1

Tema : Meningkatkan Sensitivitas Jender Aparatur Pemerintah dan DPRD, serta Masyarakat Kota Tangerang dalam Proses Kebijakan Publik

Dalam Diskusi Publik 1, topik yang menjadi bahasan serius antara lain mengenai partisipasi perempuan dalam proses kebijakan. Menurut narasumber yang dihadirkan dari Pemkot Tangerang, Ibu Lilis Nawangsih - Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemkot Tangerang, selama ini masyarakat sudah sangat dilibatkan dalam proses kebijakan karena selama ini sudah terdapat 3 kategori kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah dilakukan yaitu: *pertama*, kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. *Kedua*, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat; dan *ketiga*, kegiatan yang bersama-sama dilakukan oleh SKPD dan masyarakat.

Doc. The Indonesian Institute



Narasumber Diskusi Publik 1
Neng Dara Affiah dan
Dra. Lilis Nawangsih

Namun, hal ini mendapatkan sanggahan dari aktivis perempuan, antara lain Ibu Mieke Yulia dari KPI Tangerang yang menyatakan bahwa pada tataran bawah aktivis perempuan tidak dilibatkan dalam proses itu. Keterlibatan kaum perempuan masih dinilai terbatas pada perempuan yang tergabung dalam PKK. Keterlibatan PKK dikarenakan organisasi ini secara struktural sudah ada sampai di tingkat Kelurahan. Perempuan dalam kelompok buruh dan LSM masih kesulitan jika ingin ikut serta dalam proses kebijakan.

Apalagi karena partisipasi perempuan menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan pengetahuan; kesan negatif dari Pemerintah dan tidak dianggap, meskipun mereka juga berupaya mengangkat isu-isu nyata, seperti kesejahteraan buruh; kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); kesehatan ibu dan anak; hak kesehatan reproduksi perempuan; diskriminasi gaji dan jabatan; kebutuhan modal untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, dan sebagainya.

Persoalan lain yang menjadi topik hangat dalam Diskusi Publik 1 ini adalah mengenai keberadaan Perda Nomor 7 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dan Perda Nomor 8 tentang pelarangan pelacuran yang merupakan visi dari Walikota Tangerang. H.M. Cholil Abdul Madjid selaku Pimpinan Komisi A DPRD Kota Tangerang (2004-2009), menyatakan roh dari dua Perda ini adalah untuk meminimalisir pelacuran dan peredaran miras yang selama ini mulai meresahkan. Hal ini mendapat tanggapan dari peserta diskusi yang mempertanyakan efektivitas kedua Perda tersebut untuk menjamin bahwa penerapannya telah menciptakan Kota Tangerang yang bersih total dari pelacuran dan miras, sementara ada ranah privat (seperti akses perempuan ke pekerjaan; dan cara berpakaian perempuan). Singkatnya, dalam penerapannya keberadaan Perda ini justru menimbulkan keresahan bagi pekerja perempuan yang harus bekerja hingga larut malam di pabrik-pabrik.

Dinamika diskusi ini terus berlanjut sehingga berujung pada kesimpulan bahwa dalam proses kebijakan, Pemkot Tangerang sebaiknya untuk masa mendatang melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya perempuan sehingga tidak lagi menghasilkan kebijakan yang tidak sensitif gender. Sementara, mengenai keberadaan Perda No 7 & 8, masih terbuka kemungkinan untuk dibahas kembali bila tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Public Hearing 1

Tema : Perlindungan terhadap Hak dan Kepentingan Perempuan dalam Kebijakan Publik untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Kota Tangerang

Dalam *public hearing* ini persoalan yang mendapat perhatian khusus dari peserta adalah mengenai isu-isu utama perempuan antara lain, KDRT; kesehatan reproduksi; pemberdayaan perempuan baik di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan reproduksi, dan sosial politik.

Supriyadi Sebayang, Advokat dari PBHI Jakarta, menyampaikan hasil *focus group discussion* (FGD) PBHI bahwa terjadi diskriminasi terhadap 4 sektor: kaum buruh, ibu rumah tangga, aktivis, dan pelajar. Di sektor buruh perempuan: cuti hamil dan haid yang tak diberikan, upah yang tak layak, tak ada antar jemput untuk pulang malam, diskriminasi perempuan dalam hal jabatan, tak adanya perlindungan bagi buruh perempuan yang pulang malam, dan pelecehan seksual di tempat kerja. Di sektor ibu rumah tangga: tidak dilibatkannya kaum miskin kota, sehingga sering digusur tanpa tahu sebelumnya. Di sektor aktivis perempuan: terbatasnya ruang partisipasi, dan *negative image* dari Pemkot terhadap aktivis yang vokal. Di sektor pelajar: pelajar jarang dilibatkan, pelecehan seksual, dan pendidikan gender yang kurang.

Doc. The Indonesian Institute



Narasumber Public Hearing 1,
Dra. Eny Nuraeny dan Supriyadi Sebayang

Dalam hal ini, Pemkot dinilai tidak cepat mengambil tindakan *affirmative* tentang kisruh permasalahan Perda dan sering dibawa ke persoalan moral, sehingga sering menimbulkan kisruh di dalam masyarakat. Hal ini disetujui oleh peserta yang hadir bahwa persoalan ini harus menjadi fokus Pemkot Tangerang untuk dapat menyelesaikan persoalan ini.

Sementara, Ibu Eny Nuraeny, Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender, BPMKB Pemerintah Kota Tangerang mengakui keberadaan masalah-masalah yang di atas, kendala yang dialami selama ini adalah masalah birokrasi yang sulit terutama dalam hal anggaran.

Kesimpulan dalam *Public Hearing 1* ini adalah bahwa ada kebutuhan mendesak akan Perda-perda khusus terutama yang mengatur hak perempuan, seperti Perda tentang pemberdayaan perempuan; perlindungan pekerja perempuan, seperti buruh; serta Perda lain terkait perlindungan hak dan kepentingan perempuan di berbagai bidang.

Lebih jauh, sosialisasi Perda yang optimal kepada masyarakat secara berkala juga dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat akan hak dan kewajibannya. Peluang sinergi antara Pemkot dan LSM sangat besar, yaitu ketika Pemkot membutuhkan suatu Perda yang relevan, LSM dapat mengambil peran sebagai *stakeholders* yang memberikan desakan untuk mengadakan Perda yang dibutuhkan.

Diskusi Publik 2

Tema: Membangun Jejaring antara Pemerintah, DPRD, dan Partisipasi Publik Masyarakat Kota Tangerang dalam Proses Kebijakan Publik yang Memperhatikan Pluralisme Sosial dan Kesetaraan Perempuan



Doc. The Indonesian Institute



Forum tanya jawab peserta
Diskusi Publik 2

Dalam Diskusi Publik 2, persoalan keberadaan Perda Nomor 7 & 8 kembali mengemuka. DPRD dan Pemkot Tangerang berkeyakinan bahwa Perda Nomor 7 & 8 bukan merupakan Perda Syariah. Perda-perda tersebut dinilai membantu penurunan angka kriminalitas dan dianggap sebagai cara untuk menunjukkan penghormatan Pemkot dan DPRD terhadap perempuan (perlindungan terhadap perempuan).

Di sisi lain, Sukron Kamil, narasumber dari CSRC-UIN menunjukkan temuan dari riset yang dilakukan tentang masih peliknya masalah sosialisasi Perda, selain masalah Perda yang mengancam keberagaman dan bertentangan dengan HAM, serta cenderung mengarah pada penerapan syariah tradisional.

Mengenai sosialisasi kebijakan, peserta diskusi menilai, kebijakan publik belum tersosialisasi dengan baik, serta belum melibatkan partisipasi masyarakat yang memadai. Sementara, DPRD menilai bahwa polemik yang muncul dari Perda terjadi lebih karena adanya masalah kekurangpahaman esensi. Sementara, seperti yang diterangkan, Pemerintah dan DPRD Kota Tangerang berkomitmen serius untuk pemberdayaan gender, yang menyentuh isu lain, seperti kesejahteraan, HAM, dan anak. Bahkan DPRD mendorong adanya anggaran yang memadai untuk pemberdayaan perempuan.

Kesimpulan dari Diskusi Publik 2 ini adalah bahwa Pemkot Tangerang harus lebih peka terhadap persoalan yang ada di masyarakat dan dalam proses kebijakan. Pemkot Tangerang harus lebih aktif melibatkan seluruh elemen masyarakat terutama dari kalangan pekerja perempuan. Selain itu, sosialisasi kebijakan yang dilakukan Pemkot selama ini masih belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, membangun jejaring strategis antara Pemkot Tangerang dengan aktivis perempuan, LSM, serikat pekerja, dan elemen masyarakat lainnya menjadi suatu keniscayaan.

Public Hearing 2

Tema: Penguatan Mekanisme Partisipasi Publik dalam Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Mendukung Pluralisme Sosial dan Perlindungan Hak Perempuan

Dalam *Public Hearing* ke-2 ini, hal yang paling disorot adalah mengenai partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses kebijakan. Narasumber Alif Imam Nurlambang dari PBHI menyatakan bahwa partisipasi perempuan selama ini dirasa masih sangat minim, selain karena memang tidak sepenuhnya diberi ruang dalam proses kebijakan oleh Pemkot, juga dikarenakan rendahnya keberanian perempuan dalam memanfaatkan ruang partisipasi yang ada.

Hal ini disepakati oleh peserta diskusi, salah satunya Siti Istikharoh, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Tangerang, yang mengatakan bahwa ada perasaan rendah diri yang menjangkiti pekerja perempuan Kota Tangerang. Dari 38.000 anggota SPN, 80 persennya adalah perempuan. Namun, SPN kesulitan dalam memilih pengurus perempuan, karena adanya rasa rendah diri tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh tradisi bahwa perempuan hanya dihadapkan pada pekerjaan di pabrik, selain urusan rumah, yaitu mengurus suami dan anak. Masukan dari peserta diskusi lainnya yang penting dicatat adalah bahwa dalam partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Tangerang tidak diakomodir dengan baik karena dikatakan bukan warga asli Tangerang.

Sementara, narasumber dari Pemkot Tangerang Bapak Agah Yogaswara, Kabid Sosek Bappeda Kota Tangerang, menyatakan bahwa Pemkot Tangerang sudah memutuskan anggaran untuk tahun 2010, yang secara umum berbasis gender. Pemkot akan memaksimalkan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk informasi urusan gender, meskipun belum ada program khusus. Tantangannya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih kebingungan untuk memilahnya sesuai indikator anggaran berbasis gender (seperti jumlah peserta perempuan yang hadir dalam pelatihan), agar tidak menjadi bumerang (masalah korupsi anggaran). Selain itu, dengan adanya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) dengan level Eselon II, yang sebelumnya adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM), telah berdampak pada peningkatan kegiatan-kegiatan terkait isu gender. Tantangan lain yang dihadapi adalah masih tumpang tindihnya indikator berbasis gender antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga Berencana.

Dari *Public Hearing 2* ini dapat disimpulkan bahwa Pemkot Tangerang diharapkan lebih bisa membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik, khususnya elemen pekerja perempuan untuk ikut dalam proses pengambilan kebijakan. Selain itu, perlu keberanian untuk menggagas dan menghasilkan banyak hal, selain akses perempuan yang cukup atas informasi dan sumber daya pendukung terkait lainnya, perempuan juga didorong untuk berani tampil dan aktif, misalnya sebagai pengurus organisasi. Lebih jauh, perempuan di secara ekonomi masih dilemahkan oleh cara berpikir yang sempit, seperti di sektor lapangan kerja penilaian untuk diterima bekerja yang lebih mengutamakan kriteria fisik (tinggi badan) dan kelulusan (sementara tingkat pendidikan perempuan masih banyak yang terbatas). Perempuan juga harus diberi kesempatan yang sama untuk bekerja di mana saja secara nasional. Pemkot, khususnya Disnaker juga didorong untuk meniadakan *outsourcing* dan menegaskan penegakan hak-hak buruh.

Dukungan dan Tantangan

Selama melangsungkan kampanye publik, TII mendapatkan dukungan maupun tantangan, baik internal maupun eksternal. Dukungan dan tantangan ini secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi proses perencanaan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan penilaian kampanye publik TII di Kota Tangerang.

Dukungan Internal

- Kerja sama yang baik dalam Tim TII baik dalam hal koordinasi, komunikasi, dan pembagian tugas ikut menjadi faktor pendukung keberhasilan kampanye publik TII. Hal ini juga didukung oleh sinergi dan kerja sama dengan Mitra lainnya (PBHI Jakarta dan SETARA Institute), terutama untuk kebutuhan narasumber dan kontak info Kota Tangerang, serta kehadiran dalam tiap kegiatan TII.
- Manajemen kerja yang baik, dengan pengalokasian sumber daya sesuai dengan rencana kerja dan pembagian tugas. Misalnya, pembuatan dan pemeliharaan *database* kontak informasi Kota Tangerang.

Dukungan Eksternal

- Kerja sama dengan pihak luar, dimana TII menjaga hubungan baik dengan LSM lokal, maupun Pemerintah Kota dan DPRD Kota Tangerang yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan TII. Misalnya, dengan membagikan hasil kegiatan dan terus mengikutsertakan mereka dalam kegiatan terkait kampanye publik TII. TII juga dibantu oleh LSM lokal maupun Pemkot dan DPRD terkait kebutuhan akan narasumber dan target peserta yang relevan.
- Relevansi program dengan konteks Kota Tangerang, terutama dengan kebutuhan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dalam Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Pemkot Tangerang; serta upaya *civil society* untuk terus memperjuangkan isu gender dan partisipasi publik dalam proses kebijakan. Unsur Pemkot yang juga menilai relevannya kampanye publik ini adalah Bappeda dan Sekda Pemkot Tangerang.

Lebih jauh, kampanye publik terkait isu partisipasi publik dan kebijakan publik yang mendorong kesetaraan gender dan menghargai pluralisme sosial ini juga menjadi media yang bermanfaat dan strategis untuk komunikasi publik antara pembuat kebijakan dan masyarakat umum, termasuk LSM, lembaga penelitian, serikat buruh, mahasiswa, dan sebagainya yang tertarik dan peduli pada isu gender dan pentingnya jejaring antara pembuat kebijakan dan masyarakat dalam proses kebijakan.

Kampanye publik TII, seperti *public hearing* juga dilihat oleh masyarakat sipil sebagai kesempatan untuk menyalurkan pendapat, saran, dan kritik yang membangun terhadap Pemkot dan DPRD, terutama terkait dengan partisipasi publik yang terbuka dan tidak diskriminatif dalam proses kebijakan, serta upaya untuk mendorong kebijakan yang peka gender.

- Kebersediaan dan partisipasi dari Pemerintah dan DPRD Kota Tangerang. Hadirnya narasumber yang mewakili Pemkot (BPMKB, Sub Bag PUG, Sekda, Bappeda), DPRD menunjukkan tanggapan positif Pemkot dan DPRD atas kegiatan ini. Dalam hal ini, Pemkot dan DPRD memanfaatkan kampanye publik sebagai media untuk menanggapi aspirasi peserta, yang juga ditanggapi oleh narasumber dari LSM maupun kampus. Kebersediaan dan partisipasi Pemkot dan DPRD juga disambut baik oleh para peserta dari kalangan masyarakat sipil yang bersedia memberikan kritik dan saran yang membangun, serta tampak kooperatif dan bersedia untuk membantu Pemkot terkait dalam mengusung isu gender dalam proses kebijakan.
- Pemkot (Sekda dan Bappeda), serta DPRD juga mengapresiasi terselenggaranya forum diskusi publik oleh TII, serta menyampaikan sambutan mereka untuk masukan dari publik dalam proses kebijakan Instansi Pemkot yang cukup signifikan dan relevan, yaitu BPMKB yang membawahi program pemberdayaan perempuan cukup mendukung dan bersedia terlibat sejak di Diskusi Publik dan berlanjut dengan *Public Hearing*. Lebih jauh, topik yang diangkat TII pun dinilai relatif masih dalam tahapan isu yang belum terlalu sensitif.
- Komitmen dari LSM lokal dan elemen masyarakat terkait, seperti dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Tangerang dan Serikat Pekerja Nasional (SPN), Cisadane Institut, CSRC UIN Syarif Hidayatullah, maupun masyarakat umum lainnya, yang cukup antusias dan kritis, serta aktif dalam kegiatan TII, baik dalam diskusi publik maupun *public hearing*. Apalagi para peserta *public hearing* pun memiliki kesempatan yang luas dan sama untuk menyuarakan kritik, saran, dan aspirasinya.

Bagi kelompok tertentu seperti KPI Kota Tangerang dan SPN, kegiatan seperti *public hearing* juga dapat menjadi forum dengar pendapat dan *lobbying* untuk membawa isu internal mereka, seperti kelompok pekerja yang mengangkat kasus-kasus dalam kerja advokasi mereka kepada Pemkot; maupun KPI yang menilai masih adanya diskriminasi partisipasi mereka dalam kebijakan publik ke Bappeda Kota Tangerang.

Doc. The Indonesian Institute



Seorang peserta *Public Hearing* menyampaikan aspirasi

- Partisipasi media lokal maupun nasional yang hadir dalam kegiatan TII dan liputan media di media massa cetak maupun elektronik, seperti di *Sinar Harapan*, *Indo Pos*, dan Majalah *Ad Info*; serta CTV Banten, menunjukkan ketertarikan dan komitmen yang cukup kuat dari media akan isu ini untuk menyebarkan informasinya sebagai bagian dari fungsi media untuk penyebaran informasi dan pendidikan publik.

Tantangan Internal

Terutama di awal proses perencanaan kampanye publik TII di Kota Tangerang adalah minimnya *database* narasumber dan partisipan, serta *networking* yang potensial, serta relevan untuk dilibatkan sebagai narasumber dan partisipan.

Tantangan Eksternal

- Lamanya waktu menunggu disposisi untuk konfirmasi narasumber dari Pemkot. Disposisi yang sangat lambat dan tidak jelas instruksinya ke siapa atau bagian apa atau kontak infonya, meskipun *Terms of Reference* (TOR) dan undangan sudah diberikan 2 minggu atau lebih awal sebelum pelaksanaan kegiatan, serta lewat upaya konfirmasi intensif dari pihak TII.

Tantangan lain yang sempat dihadapi TII adalah tidak diberikannya disposisi oleh Walikota untuk narasumber dari Sekda, selain adanya peraturan baru bahwa narasumber dari Pemkot harus diwakili Eselon tertentu, misalnya Eselon II dan III.

- Sementara, tantangan narasumber dari DPRD adalah jadwal kerja atau *availability* Anggota DPRD yang tidak menentu, bahkan yang sebelumnya sudah konfirmasi dapat hadir. Selain itu, masih ada tantangan untuk keberadaan Anggota DPRD yang benar-benar memahami isu gender. Misalnya, DPRD yang terkesan defensif terkait Perda No. 8 dan menganggap protes dan polemik Perda tersebut lebih dikarenakan kekurangpahaman daripada masalah sosialisasi.
- Masih kuatnya kesan resistensi antara Pemkot dan DPRD dengan aktivis yang dipandang vokal, misalnya dengan anggota KPI dan SPN Kota Tangerang yang cukup dominan. Selain itu, masih ada kesan pembatasan diri antara Pemkot dengan elemen masyarakat, seperti aktivis perempuan, kelompok buruh, termasuk buruh perempuan yang dipandang vokal; atau tidak dianggap memiliki massa dan kegiatan, serta pembina yang jelas, seperti PKK.

Hal ini juga tidak lepas dari prosedur birokrasi yang juga membatasi upaya perluasan partisipasi publik dalam proses kebijakan. Lebih jauh, masih kentalnya kesan defensif dari Pemkot (Sekda dan Bappeda, serta DPRD), terkait dengan kritik dari masyarakat atas kurangnya sosialisasi kebijakan publik dan masih terbatasnya akses partisipasi publik dalam proses kebijakan, (terutama dari aktivis KPI Kota Tangerang), misalnya terkait dengan Perda No. 8.

Hal ini juga dapat dilihat dari dikotomi partisipasi publik, misalnya antara status sebagai buruh/tenaga kerja atau penduduk/warga/masyarakat dalam rangkai keterlibatan dalam kesempatan pelatihan-pelatihan keterampilan. Apakah melalui jalur Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) atau Bappeda. Sementara di lapangan, akses informasi pelatihan, misalnya untuk kelompok buruh masih terbatas.

- Adanya kesan kesenjangan antara aktivis LSM lokal dan masyarakat akar rumputnya, sehingga gaung advokasi dikuatirkan tidak sampai ke *grass roots* (kelompok akar rumput). Komposisi audiens yang belum berimbang antara audiens yang berasal dari kalangan pemerintah, pengamat/akademisi, dan LSM.
- Dikuatirkan isu internal yang diangkat oleh audiens bila melebar dari topik dan agenda, bila terlalu menekan narasumber Pemkot/DPRD kontradiktif menambah resistensi birokrat. Selain itu, masih ada kekuatiran dari LSM lokal untuk memberikan informasi kontak yang lengkap kepada Pemkot, terkait keikutsertaannya dalam proses kebijakan, meskipun ada kesempatan lewat forum diskusi publik terbuka

Doc. The Indonesian Institute



Peserta *Public Hearing* 2
dari KPI Tangerang

- Adanya kehadiran media lokal berupa majalah yang terbit berkala bulanan, sehingga tidak dapat langsung mempublikasi kegiatan diskusi publik ini pada hari setelah acara berlangsung. Misalnya, untuk *Ad Info* dan *Info Serpong*, info yang didapat, menyusul untuk publikasi liputan di bulan Agustus dan Juli 2009. Belum lagi, sempat adanya satu orang wartawan dari *The Jakarta Post* yang sempat terhambat untuk masuk ke ruang acara diskusi, dikarenakan sikap hati-hati pihak hotel terhadap wartawan.

Media juga masih ada yang memiliki budaya 'amplop', sehingga bersedia hadir dan meliput berita, serta memberikan informasi liputan, jika dibayar. Tantangannya adalah bahwa tidak semua media tertarik untuk mengangkat isu ini atau berpartisipasi aktif dalam proses kegiatan TII. Pun jika media mengulas kampanye publik TII atau ingin meliput kegiatan ini, ada permintaan untuk dana tertentu, meskipun TII mengikutsertakan media untuk ikut melakukan kampanye publik sebagai bagian dari kapasitasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Pun tidak mudah untuk hanya menanyakan informasi apakah media yang hadir meliput dan jika ya, kapan, dan di bagian/kolom/nama acara apa tepatnya, sebagai bagian dari catatan kegiatan kampanye publik TII. Tantangan lain adalah ketika ruang di media (media cetak misalnya) lebih banyak dipenuhi oleh iklan, yang memberikan nilai komoditas dan komersial tersendiri bagi media.

- Dalam proses kegiatan, ada kecenderungan narasumber selalu mulai lagi dari awal dengan konsep-konsep introduksi perspektif gender (pemaparan konvensi-konvensi tentang gender dan *gender mainstreaming*) yang membuat advokasi seolah berjalan di tempat, meskipun telah dijelaskan lewat TOR maupun komunikasi saat TII mengundang.

Selain itu, masih terlihatnya perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dan masyarakat yang terkena kebijakan, terutama perempuan, yang melihat masih belum terbukanya partisipasi publik yang luas (pengakuan untuk keterlibatan aktivis dan kelompok perempuan, maupun serikat buruh) dalam proses kebijakan.

- Dari komposisi keseluruhan dari personel narasumber dan partisipan kegiatan advokasi TII di Tangerang, dari rangkaian kegiatan Diskusi Publik 1, *Public Hearing 1*, dan *Public Hearing 2*, keterwakilan perempuan dan laki-laki baik sebagai narasumber dan partisipan, sudah menunjukkan komposisi yang berimbang.
- Adanya kebutuhan untuk bersinergi aktivis LSM lokal dan masyarakat akar rumputnya, serta dengan elemen masyarakat terkait lainnya untuk mengoptimalkan upaya kampanye publik untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kebijakan publik yang peka gender.
- Keterbatasan sumber pendanaan untuk keberlanjutan pengembangan advokasi setelah selesainya program advokasi ini.



Monitoring dan Evaluasi

Tanggapan Pembuat Kebijakan dan Pemangku Kepentingan

Pemerintah Kota Tangerang

Pihak Pemkot (Bappeda dan Sekda) dalam Diskusi Publik yang ke-2 pada 28 Oktober 2009, mengutarakan sambutan mereka atas partisipasi (kritik dan saran) dari masyarakat dalam proses kebijakan. Apalagi sudah tersedia saluran dalam proses kebijakan, dari forum rembug warga sampai ke Musrenbang. Pemkot juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan menghasilkan kebijakan yang peka gender.

Misalnya, dengan adanya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMKB), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), tempat penitipan anak, selain program-program pemberdayaan perempuan lainnya, yang didasari oleh Surat Keputusan (SK) Walikota. Lebih jauh, Walikota lewat Perda No. 8 juga memiliki visi dan misi demi melindungi dan menjaga kehormatan perempuan, serta membenahi masyarakat.

Pemkot juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat di Kota Tangerang sudah tinggi, terutama terkait dengan upaya pembangunan di berbagai bidang, termasuk pembangunan jalan lingkungan yang besar (pembangunan berbasis wilayah). Pihak Pemkot juga mendorong agar para aktivis perempuan di Kota Tangerang berani menyampaikan kritik kepada Pemkot, selain meyakinkan bahwa Eselon 4 sampai 2 di Kota Tangerang, 34 persen dipegang oleh perempuan; bahkan lurah juga ada yang perempuan.

Dengan demikian, Pemkot membantah adanya diskriminasi gender dalam pemerintahan Kota Tangerang. Pemkot juga berargumen bahwa tiap daerah memiliki kekhasan. Perda No. 8 bukan merupakan Perda Syariah dan telah melalui diskusi panjang. Apalagi semua agama melarang pelacuran. Pemkot juga mengatakan tidak pernah menerapkan jam malam atau salah tangkap selama menerapkan Perda tersebut. Pun, jika Perda memiliki kelemahan diakui akibat multitafsir dan akan direvisi. Perda juga dibuat untuk mengatur laki-laki dan Pemkot telah menerapkannya dengan efektif terlepas dari kelemahan Perda. Bahkan Pemkot memiliki niat baik untuk mengundang LSM yang peduli dalam Musrenbang.

Pihak Pemkot yang diwakili oleh Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi BAPPEDA dalam *Public Hearing* 2, tanggal 9 Desember 2009, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya forum *public hearing* oleh TII. Bahkan Pemkot (terutama dari Bappeda dan Sekda, serta BPMKB) berusaha memastikan bahwa ada perwakilan yang kompeten dan relevan dari pihak Pemkot untuk hadir dalam kegiatan ini. Lewat forum ini, Pemkot menginformasikan tentang Anggaran 2010 Kota Tangerang yang sudah diselesaikan dan akan diperiksa oleh Pemerintah Provinsi Banten terlebih dahulu.

Forum ini merupakan kesempatan yang baik, apalagi Pemkot juga mengutarakan anggaran yang berbasis gender yang tengah diterapkan dan menjadi tantangan dalam pemenuhan targetnya oleh Pemkot. Pemkot juga mengutarakan tantangan dalam melaksanakan program yang berbasis gender, baik dari segi pelaksanaan maupun anggaran, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga masih mengalami kebingungan.

Doc. The Indonesian Institute



Peserta *Public Hearing* 1
dari mahasiswa dan guru pengajar SMA

Belum lagi masih adanya tumpang tindih penindaklanjutan isu dan kebijakan gender, baik dari Dinas Sosial, Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. Pemkot juga menyampaikan optimismenya akan kebijakan berbasis gender terlepas dari kebingungan teknis dalam pelaksanaannya, apalagi dengan adanya BPMKB yang setingkat dengan Esselon II, sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan. Pemkot juga akan memaksimalkan P2TP2A untuk urusan gender.

Lebih jauh, BPMKB mengapresiasi forum yang difasilitasi TII sebagai jembatan komunikasi publik Pemkot dan bermanfaat bagi BPMKB untuk

membangun *networking* dengan masyarakat sipil, terutama dari LSM yang berkecimpung di isu gender. Bappeda juga mengapresiasi terselenggaranya forum kampanye publik yang difasilitasi oleh TII. Hal ini terlihat dari upaya mereka untuk mengusahakan adanya perwakilan dari Bappeda dalam *Public Hearing* 2 dan bersikap kooperatif dalam menanggapi undangan dari TII sebagai narasumber, terlepas dari bersamaannya kegiatan ini dengan rapat kerja Pemkot saat itu.

Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tangerang

DPRD dalam Diskusi Publik 2 tanggal 28 Oktober 2009, menyatakan terbuka akan partisipasi (kritik dan saran) masyarakat dalam proses kebijakan. DPRD juga menegaskan adanya komitmen HAM dan tidak adanya Perda Syariah di Kota Tangerang. Bahkan DPRD terbuka untuk melakukan uji Perda bersama. Di DPRD, Badan Legislasi di Periode 2009-2014 ini juga dipimpin oleh perempuan dan dikaitkan dengan keterwakilan perempuan dalam politik.

Menanggapi usulan LSM untuk memasukkan ketentuan spesifik dalam Tatib terkait partisipasi perempuan dalam proses kebijakan, DPRD mengatakan bahwa perempuan tidak perlu didorong-dorong, dan baik laki-laki maupun perempuan harus maju bersama-sama. Bahkan di Pemkot, Dinas Kesehatan, PU, Pemukiman, Tata Kota mayoritas diisi oleh perempuan. Dengan demikian, terbukti perempuan lah yang mengontrol pembangunan di Kota Tangerang.

Secara umum, Anggota DPRD yang menjadi narasumber menanggapi kampanye publik TII dengan kooperatif dan mengapresiasi upaya TII lewat forum-forum yang ada, terlepas dari tantangan keterbatasan Anggota DPRD yang menggeluti isu gender, maupun sensitifnya isu ini dalam konteks kebijakan publik di Kota Tangerang. Anggota DPRD terkait juga memanfaatkan forum kampanye publik TII untuk menyampaikan posisi dan kebijakan DPRD mengenai isu gender dalam proses kebijakan di Kota Tangerang, serta tantangan yang dihadapi.

Masyarakat

Dari Diskusi Publik 1 tanggal 24 Juni 2009, muncul beberapa isu terkait yang diangkat oleh masyarakat dan membutuhkan dukungan dari Pemda, diantaranya terkait dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan, serta anggaran untuk pemberdayaan perempuan.

Pertama, terkait dengan pelibatan masyarakat (juga aktivis) dalam proses kebijakan sampai tataran yang lebih rendah di RT dan RW, misalnya lewat Musrenbang. Pelibatan masyarakat secara arif (juga kalangan akademisi dan aktivis) dinilai penting, mengingat DPRD memiliki keterbatasan dalam hal legislasi. DPRD juga berkepentingan untuk mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tepat dan baik, serta memikirkan dampak kebijakan bagi masyarakat, seperti halnya yang terjadi dalam penerapan Perda Nomor 7 dan 8.

Kedua, terkait peningkatan anggaran pemberdayaan perempuan (peka gender) yang diharapkan dapat meningkatkan pendidikan politik dan kemampuan perempuan dalam berpolitik. DPRD juga didorong untuk meningkatkan anggaran untuk *capacity building* anggota perempuan DPRD, selain memberi ruang bagi kiprah perempuan dalam politik di DPRD dengan kemampuan politik yang mumpuni. Isu lain yang juga membutuhkan dukungan dari DPRD, diantaranya terkait dengan pembuatan legislasi yang melibatkan masyarakat secara arif dan substantif (tidak hanya formalitas), sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Dari sesi tanya jawab di Diskusi Publik 1, diidentifikasi beberapa isu dalam proses kebijakan. Misalnya, terkait dengan Perda Nomor 7 dan 8 yang dinilai mengekang kebebasan perempuan di ranah publik, terutama terkait dengan akses ekonomi (akses pekerjaan); juga di ruang privat, karena adanya pengaturan cara berbusana dan dampak keterbatasan gerak bahkan di ruang privat, seperti rumah kontrakan.

Ada pula usulan untuk membuat RUU untuk perlindungan HAM Perempuan khusus Kota Tangerang, seperti UU serupa yang sudah ada di Maluku. Terkait proses kebijakan, seperti Musrenbang, KPI Kota Tangerang yang merupakan bagian dari aktivis perempuan merasa tidak dilibatkan, bahkan di tingkat bawah, karena sudah diatur oleh RT dan RW, dan mereka tidak ikut dalam PKK. KPI mengkritik pemangku kepentingan di Kota Tangerang hanya mengikuti selera sendiri dan tidak pernah melibatkan masyarakat dalam programnya. Hal lain yang tak kalah penting adalah tentang pemberian ruang gerak bagi perempuan

dalam politik yang lebih luas dengan meningkatkan kesadaran politik perempuan lewat pendidikan politik agar perempuan mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Dari *Public Hearing* 1, tanggal 12 Agustus 2009, masyarakat mengajukan beberapa usul kepada Pemkot. **Pertama**, terkait dengan pelibatan masyarakat (tidak hanya PKK; namun juga aktivis LSM perempuan dan Serikat Buruh) dalam proses kebijakan sampai tataran yang lebih rendah di RT dan RW, misalnya lewat Musrenbang.

Kedua, program-program nyata terkait pemberdayaan perempuan, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan (khususnya reproduksi), dan sosial politik. Misalnya, melalui penerbitan SK langsung dari Walikota; penegakan hukum untuk melindungi buruh perempuan; dan penerbitan Perda-perda khusus perempuan.

Dari *Public Hearing* 1, terutama lewat kerja kelompok para peserta, berhasil dijangkau beberapa permasalahan mendesak yang diusulkan ke Pemkot Tangerang terkait dengan tradisi keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan; pembuatan Perda-perda khusus; pembentukan wadah untuk pemberdayaan perempuan; pengawasan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan; dan upaya pembuatan kesepakatan bersama khusus yang berpihak pada kebutuhan perempuan.

Dalam Diskusi Publik 2 tanggal 28 Oktober 2009, partisipan berhasil mengidentifikasi beberapa isu terkait proses kebijakan. Diantaranya: masalah belum tersosialisasikannya kebijakan, seperti Perda; masih adanya produk kebijakan yang diskriminatif dan problematik terhadap pluralisme sosial; pentingnya jejaring penyadaran hak-hak sipil dalam proses kebijakan juga kebebasan beragama; pentingnya penyadaran tentang kesetaraan gender; perlunya penguatan LSM dalam proses kebijakan; selain mendorong tradisi kritis media dan fungsi pengabdian universitas.

Dalam Diskusi Publik 2, partisipan memberikan kritik dan saran kepada Pemkot dan DPRD terkait proses kebijakan untuk membudayakan dialog dan saling kenal. Usulan lain yang muncul adalah untuk menyebutkan secara spesifik tentang partisipasi perempuan dalam tahap proses kebijakan dalam setiap produk perundangan di Kota Tangerang. Pemkot dan DPRD juga ditantang untuk berani mendukung pluralisme sosial di Kota Tangerang. Terkait kesadaran gender, masyarakat juga mengusulkan agar Pemkot dan DPRD fokus pada hak-hak perempuan di ranah profesi lewat kebijakan yang peka gender dan HAM, terutama untuk memenuhi kebutuhan pekerja perempuan, seperti antar jemput, hak-hak upah, dan lain-lain.

Dalam kampanye publik terakhir berupa *Public Hearing* 2, tanggal 9 Desember 2009, partisipan berhasil mengidentifikasi beberapa isu terkait proses kebijakan. Diantaranya: masih belum optimalnya penerapan mekanisme partisipasi publik, terutama mengingat tidak adanya dampak hukum jika hal ini diabaikan oleh pembuat kebijakan. Partisipasi publik juga masih diabaikan akibat dikotomi yang diterapkan oleh Pemkot bagi publik ketika ingin mengakses kesempatan peningkatan kapasitas maupun

ketika ingin berpartisipasi dalam proses kebijakan. Belum lagi adanya kriteria masyarakat asli Tangerang untuk bisa memberikan masukan dalam proses kebijakan.

Hal lain yang diangkat adalah tentang perubahan cara pandang tentang posisi perempuan dalam masyarakat dengan peran ganda, yang diterima secara tradisional, meskipun hal ini juga merupakan tantangan dan beban untuk perempuan. Dalam *Public Hearing 2*, partisipan juga memberikan kritik dan saran kepada Pemkot terkait proses kebijakan untuk memperbaiki komunikasi publik, terutama terkait dengan informasi proses kebijakan dan partisipasi publik dalam proses kebijakan.

Pemkot juga diminta untuk membuka kesempatan luas kepada masyarakat Tangerang untuk ikut berperan dalam proses kebijakan maupun mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Masyarakat juga meminta Pemkot untuk melakukan sosialisasi kebijakan secara rutin, mengingat dana yang dialokasikan memang tersedia untuk itu. Peran DPRD juga dituntut untuk membawa aspirasi masyarakat dan memperjuangkan, serta mengawalinya dalam proses kebijakan.

Di sisi lain, partisipan juga mendorong kelompok perempuan untuk lebih percaya diri untuk mengaktualisasikan dirinya dalam ranah publik dalam proses kebijakan. Hal ini juga membutuhkan kepekaan pembuat kebijakan untuk memprioritaskan perempuan dalam proses kebijakan, dengan mekanisme pelibatan yang ramah terhadap perempuan (waktu singkat, isu relevan dan nyata menyangkut perempuan).

Peran media juga dibutuhkan bersama dengan masyarakat sipil untuk bersinergi dan bekerja sama untuk mengawal dan memperjuangkan isu kesetaraan gender dan pluralisme terkait kebijakan publik. Lewat forum ini, masyarakat meminta adanya informasi yang jelas tentang kebijakan publik dan prosesnya, dan bisa menanyakan langsung di mana tepatnya atau di tahap apa masyarakat bisa diikutsertakan atau berpartisipasi dalam proses kebijakan maupun pelaksanaan program-program Pemkot.

Lebih jauh, Pemkot juga diminta peka untuk melibatkan buruh di Kota Tangerang yang 80 persen adalah perempuan untuk ikut diprioritaskan dalam proses kebijakan. Dalam forum, masyarakat juga memberikan masukan agar Pemkot melihat gender tidak hanya urusan perempuan, namun urusan bersama.

Secara umum, publik Kota Tangerang, terutama partisipan kegiatan TII, menyatakan apresiasi dan dukungan atas kegiatan kampanye publik TII di Kota Tangerang. Misalnya, Ismawati (KPI Kota Tangerang), yang mengatakan bahwa riset TII dapat menjadi jembatan yang bagus terkait itu sini. Selain itu, Siti Istikharoh (SPN Kota Tangerang) mengatakan bagus ada lembaga seperti TII yang juga peduli pada isu ini dan TII diharapkan untuk mempublikasikan hasil kegiatan ke semua pihak selain pembuat kebijakan. Nursanita, Dosen UI yang pernah menjadi Anggota DPR RI FPKS (2004-2009), juga mengatakan bahwa TII dan Mitra dapat berperan mengawal proses kebijakan di Kota Tangerang.

Media

Beberapa isu terkait yang muncul dari Diskusi Publik 1 tanggal 24 Juni 2009, yang membutuhkan dukungan dari media adalah memberikan informasi sekaligus pendidikan kepada masyarakat tentang mutlaknya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik di Kota Tangerang. Partisipasi media sendiri telah ditunjukkan lewat beberapa liputan yang relevan dengan isu ini.

Di antaranya adalah sebagai berikut. Harian *Sinar Harapan* (SH) pada 25 Juni 2009 mengeluarkan pemberitaan tentang Diskusi Publik 1 tanggal 24 Juni 2009. SH memberitakan antara lain pernyataan dari Neng Dara Affiah dari Komnas Perempuan, bahwa keterlibatan perempuan dalam pembuatan setiap kebijakan publik adalah keniscayaan dalam era demokrasi. SH juga mengangkat pernyataan M. Syauqillah dari SETARA Institute, bahwa beberapa daerah di Propinsi Banten masih keliru dalam menerapkan proses pembuatan Perda. Sebagaimana SH, Harian *Indo Pos* juga mengangkat fakta bahwa ada 154 Perda yang diskriminatif terhadap perempuan di tingkat nasional, termasuk diantaranya Perda No. 7 tentang Minuman Keras & No. 8 Tentang Pelacuran Kota Tangerang.

Lewat kunjungan TII ke media (Tangerang Ekspres), media menyampaikan tanggapan positifnya dan dukungan untuk kampanye publik TII di Kota Tangerang. Media lokal dan jaringannya di Kota Tangerang juga lewat perwakilannya, menyatakan kesediaan untuk hadir dan berpartisipasi dalam kampanye publik TII terkait isu partisipasi publik dan kesetaraan gender dalam proses kebijakan di Kota Tangerang.

Media juga menyatakan masih pentingnya keberlanjutan program kampanye publik dan advokasi seperti yang dilakukan TII terkait isu ini di Kota Tangerang. Bahkan media juga memiliki jaringan (kelompok diskusi khusus) yang bertemu rutin dan membahas tentang kebijakan publik Kota Tangerang, termasuk isu yang diangkat dalam kampanye publik ini. Kelompok ini dapat diandalkan sebagai mitra yang dapat mewakili media lokal di Kota Tangerang dalam kegiatan TII ke depan.

Pelajaran yang dipetik (*Lessons Learned*)

Dari rangkaian proses kerja advokasi isu perempuan di Kota Tangerang yang telah dilakukan oleh The Indonesian Institute, beberapa pelajaran yang dapat dipetik antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) **Kesenjangan partisipasi publik.** Peran partisipasi publik dalam proses penyusunan dan pelaksanaan produk kebijakan publik memang merupakan satu hal yang sampai sekarang ini masih menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Antusiasme masyarakat dalam rangkaian diskusi publik dan *public hearing* menunjukkan adanya aspirasi yang belum terakomodasi, terutama tentang isu kebijakan publik yang terkait pluralisme sosial, kesetaraan hak perempuan, dan perlindungan hak-hak konstitusional perempuan.

- (2) Hambatan birokratis pada lembaga legislatif dan eksekutif.**
Akomodasi partisipasi publik dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik seringkali terhambat dengan kendala birokrasi pada institusi eksekutif (Pemerintah Daerah) maupun institusi legislatif (DPRD). Institusi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tampak masih belum cukup fleksibel untuk merespon dan mengakomodasi upaya-upaya pelibatan partisipasi publik dalam forum-forum yang diharapkan menjadi wadah interaksi antara pejabat pemerintah, anggota dewan, dan komponen masyarakat.
- (3) Kesenjangan jejaring antara pemerintah, dewan dan masyarakat.**
Hubungan antara pejabat pemerintah, anggota dewan, dan aktivis masyarakat, terutama dari LSM atau aktivis perempuan dan pekerja perempuan tampaknya masih cukup tegang, terutama di awal-awal proses kerja advokasi ini. Ada kesan masih kuatnya posisi mengambil jarak antara pejabat Pemkot dan DPRD dengan LSM atau aktivis perempuan dan pekerja perempuan. Padahal dari dinamika kegiatan advokasi ini terungkap bahwa antara pihak-pihak ini sebetulnya ada peluang sinergi.
- (4) Sensitivitas isu perempuan dan pluralisme sosial.** Masih erat kaitannya dengan latar belakang mengapa kerja advokasi isu perempuan di Kota Tangerang muncul, pada proses kerja advokasi ini, masih terasa bahwa isu perempuan dan pluralisme sosial dalam kebijakan publik di Kota Tangerang masih menjadi isu yang sensitif. Telah ditetapkan Perda No. 8 Kota Tangerang tentang anti pelacuran yang menjadi Perda kontradiktif, masih terasa menjadi tembok yang dari pihak pemerintah dan dewan tampaknya cenderung tidak mau diganggu gugat lagi. Hal ini menjalar menjadi sensitivitas isu lain yang terkait, misalnya perlindungan kepentingan dan hak-hak pekerja perempuan.

Peluang ke Depan

Sebagai penutup, pada bagian ini dirangkumkan beberapa kesimpulan pencapaian yang sudah didapat. Dari situ lalu dirangkumkan beberapa rekomendasi sebagai peluang untuk langkah ke depan selanjutnya.

Doc. The Indonesian Institute



Doc. The Indonesian Institute



Suasana forum *Public Hearing* 1

Kesimpulan

Secara umum, kampanye publik TII mendapatkan tanggapan, komitmen, dan partisipasi yang cukup positif dari birokrat, yang kebetulan adalah pria (dalam *Public Hearing* 2, narasumber dari Pemkot dan DPRD, serta LSM semuanya pria). Hal ini juga menunjukkan bahwa gender adalah urusan semua, baik laki-laki maupun perempuan dan membutuhkan kepedulian bersama.

Integrasi perspektif gender dan kelompok marjinal muncul secara konsisten dan intensif dalam setiap kegiatan kampanye publik TII, baik dalam diskusi publik maupun *public hearing* dapat dilihat dari kehadiran dan partisipasi peserta, termasuk kelompok marjinal, seperti serikat buruh yang ikut memberi kritik dan saran membangun dalam proses diskusi maupun dengar pendapat umum.

Topik yang diangkat dalam kampanye publik TII selalu menggarisbawahi dua isu besar yang masih relevan bagi pembuat kebijakan maupun pemangku kepentingan di Kota Tangerang, yaitu partisipasi publik dan kebijakan publik yang peka gender dan menghargai pluralisme.

Forum seperti diskusi publik dan *public hearing* yang diselenggarakan TII telah menjadi media yang bermanfaat dan strategis untuk komunikasi publik antara pembuat kebijakan dan masyarakat umum, termasuk LSM, media, akademisi, lembaga penelitian, serikat buruh, mahasiswa, maupun perorangan, dan sebagainya yang tertarik dan peduli pada isu gender dan pentingnya jejaring antara pembuat kebijakan dan masyarakat dalam proses kebijakan.

Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan sehubungan dengan kerja advokasi mendukung pluralisme sosial dan kesetaraan hak perempuan di Kota Tangerang, antara lain :

- (1) Perlunya mengambil dan memanfaatkan momentum dari pelaksanaan produk kebijakan yang sudah dihasilkan, sebagai bagian dari partisipasi publik dalam kontribusi evaluasi dan monitoring proses kebijakan publik. Perda kontroversial dapat menjadi batu loncatan untuk itu. Yang terpenting adalah mengawal koridor kebijakan publik untuk kesejahteraan publik.
- (2) Perlunya forum-forum yang netral untuk mempertemukan para pemangku kebijakan yang kadangkala terjadi gesekan dengan isu-isu yang sensitif. Untuk itu, peran-peran fasilitasi lembaga-lembaga advokasi yang netral dan dapat menjembatani kepentingan antara pemerintah, anggota dewan, dan masyarakat menjadi tetap diperlukan.
- (3) Perlunya konsistensi lembaga-lembaga pelaku kerja advokasi untuk mendorong terbangunnya jejaring yang sinergi antara pemangku kepentingan. Konsistensi dan kesinambungan dapat dikawal dengan secara konsisten mendistribusikan pula hasil-hasil dan kesepakatan-kesepakatan dalam forum-forum diskusi dan *public hearing* kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Perlunya upaya mendorong realisasi komitmen kerja sama para pemangku kepentingan dalam pelibatan partisipasi publik dengan memanfaatkan sumber-sumber daya dan kekuatan di masyarakat untuk proses kebijakan publik yang lebih baik. Pihak-pihak yang telah cair dalam forum diskusi publik dan *public hearing*, antara lain antara pejabat lembaga pemerintahan dan aktivis kelompok masyarakat termasuk dari kelompok perempuan, ibu rumah tangga, dan aktivis pekerja perempuan dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Misalnya, serikat pekerja dapat didorong untuk tetap memberi masukan-masukan yang penting bagi perbaikan kebijakan daerah tentang pekerja perempuan; sementara pihak lembaga legislatif dan eksekutif perlu dikawal sehingga memberikan ruang-ruang partisipasi yang lebih luas, representatif, dan fair kepada kelompok-kelompok masyarakat.



Profil Institusi



The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, policy brief mingguan (Weekly Analysis), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia/The Indonesian Update) dan kajian tahunan (Indonesia Report).

Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

PROGRAM RISET DAN PELATIHAN

RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain:

(1) Analisis Keuangan Perusahaan, yang meliputi analisis keuangan dan kajian risiko keuangan. (2) Konsultansi Perencanaan Korporat meliputi riset ekonomi dan industri, evaluasi kinerja (3) Analisis Pemasaran Strategis yang meliputi pemasaran strategis dan disain program Corporate Social Responsibility (CSR)

Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah:

- (1) Analisis Kebijakan Ekonomi,
- (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional,
- (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG SOSIAL

Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan

bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah:

- (1) Analisis Kebijakan Sosial,
- (2) Explorative Research,
- (3) Mapping & Positioning Research,
- (4) Need Assessment Research,
- (5) Program Evaluation Research, dan
- (5) Survei Indikator.

PELATIHAN BIDANG POLITIK

Survei Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.



Buku ini berisi tentang dokumentasi kerja advokasi **The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research** (TII) dalam melakukan program kampanye publik dengan tema besar “Mendukung Kesetaraan Hak Konstitusional Perempuan dalam Proses Kebijakan Publik di Kota Tangerang”. TII melaksanakan program ini sejak bulan Mei 2009 sampai Juni 2010 bersama dengan dua mitra lainnya, yaitu SETARA Institute dan PBHI Jakarta. Program kampanye publik TII di Kota Tangerang ini dilakukan dalam empat rangkaian kegiatan, yaitu dua kali diskusi publik dan dua kali dengar pendapat umum.

Kampanye publik ini ditujukan pada target-target sesuai prinsip tiga pilar masyarakat madani, yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Untuk itulah, dalam setiap kegiatan kampanye tersebut, TII melibatkan narasumber dari Pemerintah Kota (BPMKB, Bappeda, dan Sekda), serta DPRD Kota Tangerang, selain dari kalangan akademisi, LSM dan mitra kerja advokasi (PBHI Jakarta dan SETARA Institute). Para peserta pun beragam dari masyarakat umum, individu, pengajar, guru, buruh, aktivis perempuan, media, mahasiswa, dan sebagainya yang peduli akan isu ini.

TII berharap bahwa program ini dapat mendorong perwujudan ataupun perubahan wawasan, kesadaran, dan sikap dari *stakeholder* terkait. Selain itu, berdasarkan program tersebut, TII juga menghasilkan publikasi dan penyebaran informasi yang relevan dan kontekstual, serta komprehensif tentang partisipasi masyarakat dan akuntabilitas serta kredibilitas proses kebijakan publik.

Buku ini TII tujuan untuk target pembaca yang relevan, baik pembuat kebijakan secara khusus dan para pemangku kepentingan di Kota Tangerang secara khusus, dan target pembaca umum yang tertarik dan peduli akan topik ini. Kami harap kampanye publik TII di Kota Tangerang dapat dimanfaatkan baik dalam proses kebijakan maupun untuk kepentingan advokasi kebijakan publik, maupun referensi akademik maupun media massa. Semoga bermanfaat.

 **THE INDONESIAN INSTITUTE**
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta 10250, Indonesia
Tel. 021 **390 5558** | Fax. 021 **3190 7814**
www.theindonesianinstitute.com

ISBN 978-979-17798-2-1



9 789791 779821